

Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana

Dari Halaman 1

dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh untuk melakukan revisi anggaran untuk membantu korban bencana.

"Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak

Prabowo Perintahkan Segera Bangun Hunian

Dari Halaman 1

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," kata Teddy dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Teddy Indra Wijaya mengatakan, rapat digelar setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Rapat itu membahas berbagai hal mengenai penanganan bencana.

Dalam foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, beberapa menteri yang hadir di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mendiktisaintek Brian Yulianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria.

Selain itu, Prabowo juga meminta pemenuhan

pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi," ujar Teungku Faisal.

kebutuhan dasar para pengungsi. Prabowo meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

"Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak," ujar dia.

Teddy mengatakan pertemuan tersebut turut dibahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi liburan akhir tahun, termasuk stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta perkembangan perekonomian nasional.

Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

"Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya," ujar Teddy.

BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per Minggu, 14 Desember 2025. Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yaitu 1.006 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025.

aktivitas perambahan liar, hingga lemahnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

Secara spesifik, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai lalai dalam mengendalikan erosi dan air larian (run-off), yang berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum dan data teknis yang tidak terbantahkan, KLH/BPLH akan melakukan pendalaman lanjutan yang komprehensif. Pendalaman ini melibatkan kolaborasi dengan tim ahli independen, termasuk ahli hidrologi, geospasial, kerusakan lahan, dan model banjir.

Pendekatan berbasis bukti ilmiah dilakukan untuk menjamin proses klarifikasi dan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, serta menjadi dasar kuat dalam menentukan kewajiban pemulihan lingkungan maupun sanksi tegas bagi entitas korporasi yang terbukti melanggar.

"Kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan demi menjamin pemulihan lingkungan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan usaha," tuturnya.

Dia memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan akan dilakukan seadil-adilnya.

Sebelumnya PT Toba Pulp Lestari membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra. Bantahan disampaikan perorangan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana

Banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi telah menyebabkan 1.022 orang tewas. Bencana tersebut berdampak di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi hingga menyebabkan lebih dari 600 ribu orang masih menjadi pengungsi.(**det/js**)

"Total korban meninggal 1.016 jiwa. Sebelumnya 1.006," kata dia dalam konferensi pers BNPP, Ahad, 14 Desember 2025.

Sementara itu, korban hilang sebanyak 212 per Ahad, 14 Desember 2025. Jumlah ini berkurang dari 217 jiwa per Sabtu, 13 Desember 2025. Selama seminggu terakhir, korban hilang berkurang sebanyak 58 jiwa.

Abdul mengatakan, jumlah pengungsi di lokasi bencana semakin berkurang. Per Ahad, 14 Desember 2025, ada sebanyak 624.670 pengungsi. Jumlah ini berkurang bila dibandingkan data Sabtu, 13 Desember 2025 yaitu 654.542 jiwa.

Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya berkata, TNI dan Polri akan membangun huntera untuk para korban. Huntera Tipe 36 itu akan dibangun dengan harga senilai Rp30 Juta.

Huntera dapat dibangun dalam 6 bulan. Sementara hunian tetap akan dibangun dengan anggaran Rp 60 juta.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bersedia untuk mencabut HGU sementara untuk pembangunan rumah itu. "Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," ujar dia dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Ahad, 7 Desember 2025 malam.(**tem/js**)

ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip Selasa (2/12).

Anwar menyebutkan pihaknya menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha. Sementara, sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Ia mengungkapkan perseroan tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).

Sementara itu, manajemen PT Agincucourt melalui Senior Manager Corporate Communications, Katarina Siberian Hardono, mengatakan perusahaan sebenarnya sudah menghentikan operasinya sejak 6 Desember 2025.

"Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi. Kami juga telah menerima panggilan Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi, dan kami akan memenuhinya," kata dia, Minggu (7/12) seperti dikutip CNBC Indonesia.

Menurut dia, saat ini perusahaan masih fokus melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

"Saat ini kami masih fokus melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait," ujar Katarina.(**ant/js**)

dah pada 13 November 2025.

Dari keseluruhan tempat tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) terkait pergeseran anggaran Pemprov Riau.

KPK sudah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi.

Abdul Wahid dkk sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(**cnni/js**)

pula membalas bahaya dengan bahaya lain. Prinsip ini bukan sekadar hukum fikih. Ia adalah etika dasar bahwa siapa pun yang membuka tanah di hulu harus mengukur dampaknya hingga ke desa paling hilir. Siapa pun yang mengambil hasil bumi punya kewajiban menjaga bumi itu tetap tegak.

Saat ini publik tidak butuh kalimat manis. Mereka butuh kepastian bahwa ada audit lingkungan yang benar-benar independen. Ada peta tutupan lahan sebelum dan sesudah tambang. Ada jejak air yang ditelusuri hingga ke titik longsor. Dan ada proses hukum yang berani menyebut nama, jika dari ratusan hektare yang dibuka itu memang ada yang dilakukan serampangan.

Agincourt boleh membantu evakuasi. Itu baik. Tapi bantuan setelah banjir hanyalah penambal luka. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi sebelum banjir. Apakah cara bekerja mereka memperkuat alam atau justru menipiskan tamengnya?

Banjir ini telah merampas hidup banyak orang. Maka yang perlu dilakukan bukan sekadar menunggu. Kita tuntut investigasi yang terbuka. Kita tuntut agar setiap perusahaan di hulu bertanggung jawab. Karena sungai tidak pernah salah. Manusia lah yang memaksanya berubah arah.

Warga 'Tercekik' Bau

Dari Halaman 1

yang terjadi beberapa waktu lalu," ungkap salah seorang warga bermarga Aritonang, Minggu (14/12/2025).

Ia mengaku, akibat sampah yang berserak itu, warga yang melintas pasti disuguhi aroma tak sedap.

"Kami yang tinggal di sekitar sini pun khawatir akibat tumpukan sampah ini. Bukan hanya aromanya yang bau busuk, tapi juga jadi sarang penyakit," ungkap Aritonang.

Untuk itu ia berharap Pemerintah Kabupaten Deliserdang, khususnya Kecamatan Percut Seiaturan, segera turun tangan membersihkan tumpukan sampah di ruas Jalan Datuk Kabu tersebut.(**A-10**)

15 WN China

Dari Halaman 1

erang dan dua kendaraan perusahaan dirusak oleh WNA tersebut. Para pelaku berbekal senjata tajam (sajam) dan airsoft gun.

Chief Security PT SRM Imran Kurniawan membenarkan adanya kejadian ini. Ia menjelaskan, penyerangan terjadi di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, pada Minggu, 14 Desember 2025 pukul 15.40 WIB.

"Dalam aksi penyerangan ini, satu mobil dan sepeda motor perusahaan kami dirusak oleh WN China," kata Imran kepada detikcom, Minggu (14/12/2025).

Kronologi kejadiannya bermula pada pukul 15.30 WIB, anggota pengamanan sipil PT SRM sedang melaksanakan tugas jaga. Terlihat aktivitas penerbangan drone di sekitar PT SRM.

Pada saat bersamaan, lima anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) Anjungan yang ada di lokasi ikut melakukan pengejaran terhadap pilot drone.

"Saat anggota pengamanan kami mengejar pilot drone, lima anggota Yonzipur 6/SD yang ada di lokasi kejadian karena mereka sedang dalam kegiatan LDS (latihan dasar satuan) di PT SRM. Jadi total ada enam yang mengejar pilot drone," beber Imran.

Kemudian, pada pukul 15.40 WIB, sekitar 300 meter dari pintu PT SRM, anggota pengamanan langsung menemui empat WNA yang menerbangkan drone.

"Saat anggota pengamanan kami dan anggota TNI turun dari kendaraan, tiba-tiba datang sebelas WN China lainnya. Mereka membawa empat bilah sajam dan airsoft gun serta alat setrum," kata Imran.(**det/js**)

Trump Siapkan

Dari Halaman 1

mah sipil pada Sabtu (13/12/2025). Dalam serangan tersebut, tiga personel militer AS lainnya juga mengalami luka-luka.

"Kami berduka atas kehilangan tiga Patriot Besar Amerika di Suriah, dua tentara, dan satu Penerjemah Sipil. Kami juga mendoakan tiga tentara yang terluka, yang baru saja dipastikan dalam kondisi baik," tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya, dikutip Senin (15/12/2025).

Trump menegaskan, serangan tersebut dilakukan oleh ISIS dan menyebut insiden itu terjadi di wilayah Suriah yang sangat berbahaya.

"Ini adalah serangan ISIS terhadap Amerika Serikat dan Suriah, di bagian Suriah yang sangat berbahaya, yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka," tulisnya..(**cnni/js**)



Ulama Aceh Ingatkan Negara

Dari Halaman 1

cermin dari realitas pahit di lapangan: pemerintah daerah telah berada di titik jenuh kapasitas. Ketika ulama yang biasanya lebih dikenal sebagai penyeru moral ketimbang pengkritik kebijakan secara terbuka menyatakan keterbatasan pemerintah daerah, maka situasinya jelas bukan biasa-biasa saja.

Dalam logika komunikasi massa, pernyataan ini adalah upaya mengganggu kenyamanan agenda negara. Ulama sedang mendorong agar bencana tidak diperlakukan sebagai berita musiman yang tenggelam oleh isu politik dan ekonomi. Dengan membawa isu ini ke ruang publik nasional, mereka sedang memaksa negara untuk memilih: hadir secara penuh atau tercatat absen dalam catatan sejarah kemanusiaan.

Permintaan penetapan status bencana nasional bukan soal gengsi daerah atau tarik-menarik kewenangan. Ia adalah soal kecepatan, keberanian, dan kejujuran negara membaca skala penderitaan rakyatnya. Tanpa status nasional, penanganan sering terjebak pada keterbatasan anggaran, koordinasi setengah hati, dan respons yang tambal sulam. Korban tidak butuh rapat berlarut, mereka butuh keputusan.

Menariknya, suara kritis itu disampaikan dari Masjid Raya Baiturrahman ruang simbolik yang selama ini menjadi saksi ketahanan Aceh menghadapi sejarah panjang bencana dan konflik. Di tempat itu, ulama tidak sekadar berbicara atas nama Aceh, tetapi atas nama nurani bangsa. Dengan menyebut wilayah terdampak lintas provinsi, pesan mereka tegas: ini bukan penderitaan lokal, ini tragedi nasional.

Ulama Aceh memahami betul kekuatan simbol dan media. Mereka tidak berteriak di jalan, tetapi berbicara melalui otoritas moral yang sukar dibantah. Dalam teori two-step flow, ulama adalah opinion leader yang mampu menggerakkan kesadaran publik sekaligus menekan pengambil kebijakan. Ketika suara seperti ini disiarkan luas oleh media, negara tak bisa lagi berlindung di balik laporan administratif.

Namun, pertanyaannya sederhana: apakah negara mau mendengar? Dalam banyak kasus bencana, negara kerap terlambat menyadari bahwa status darurat bukan ancaman politik, melainkan kebutuhan kemanusiaan.

Kekawatiran berlebihan terhadap label “bencana nasional” sering kali justru berujung pada lambannya pertolongan dan membesarnya penderitaan.

Jika seruan ulama ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas penanganan bencana, tetapi juga legitimasi moral negara. Negara yang kuat bukan yang enggan mengakui krisis, melainkan yang berani mengambil alih tanggung jawab saat rakyatnya tak lagi mampu bertahan sendiri.

Bencana alam mungkin tak bisa dicegah, tetapi pengabaian bisa dihindari. Ketika ulama harus turun tangan menyadarkan negara, itu pertanda ada yang salah dalam kepekaan kekuasaan. Dan dalam sejarah bangsa, negara yang gagal membaca penderitaan rakyatnya selalu kalah bukan oleh alam, tetapi oleh kelambanan dan ketidakpedulian.